

RENCANA KERJA (RENJA) 2024



DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Pontianak ini sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026.

Di dalam dokumen ini memuat konsep, rencana kerja, indikator kinerja, dan pendanaan pada Dinas Sosial Kota Pontianak.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut andil untuk menyumbangkan pemikiran, ide dan tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Kami berupaya menyajikan informasi dengan selengkap-lengkapnyanya walaupun disadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya.

Selanjutnya masukan dan saran senantiasa kami harapkan demi perbaikan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Pontianak. Semoga Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak dan dapat direalisasikan sesuai rencana.

Pontianak, Agustus 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...	24
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	47
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	48
3.3 Program dan Kegiatan.....	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	59
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Pontianak.....	59
BAB V PENUTUP.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, maka Perangkat Daerah wajib membuat Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi yang ada pada Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 adalah :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2002-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
- 17) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868).
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781).
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 21) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
- 22) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
- 23) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
- 24) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
- 25) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 131).
- 26) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
- 27) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor..... Tahun 2023 tentang Rencana Strategis..... Kota Pontianak Tahun 2024-2026.
- 28) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 adalah menyelaraskan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sosial berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional,

regulasi yang berlaku dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*).

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Perubahan ini dengan sistematika meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan prima, Dinas Sosial Kota Pontianak mengoptimalkan pelayanan publik guna mewujudkan lembaga yang komunikatif dalam memberikan pelayanan publik yang prima melalui berbagai bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Demi mengoptimalkan pelayanan, Dinas Sosial Kota Pontianak membuat komitmen pelayanan, yaitu :

- a. Memberikan pelayanan yang ramah, sopan, tepat dan cepat.
- b. Melayani dengan sepenuh hati tanpa pamrih.
- c. Bekerja professional sesuai dengan aturan.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menyelaraskan dengan RPJMD Kota Pontianak yaitu Menurunnya Kemiskinan.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat terukur dan dapat dicapai. Adapun yang menjadi sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial.
3. Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu.

Berangkat dari sasaran tersebut kinerja yang akan dicapai dalam periode tahun 2024-2026 adalah sesuai dengan target indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan, dimana hasil capaian tersebut menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024-2026.

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada Dinas Sosial Tahun 2021 (N-3) dan perkiraan capaian pada tahun 2023 (Tahun Berjalan), dapat tergambar pada Anggaran dan Realisasi APBD pada tahun yang bersangkutan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun lalu bertujuan untuk mengetahui capaian sasaran-sasaran yang diinginkan, Dinas Sosial Kota Pontianak telah menyusun anggaran dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Adapun Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Pontianak dan Pencapaian Renstra

Dinas Sosial Kota Pontianak sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA
PONTIANAK DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK SAMPAI
DENGAN TAHUN 2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariat an	95	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen	0	Persen	0%
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	Persen		Persem		Persen		Persen		100	Persen	0	Persen	0%
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		8	Dokumen	0	Dokumen	0%

1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		1	Dokumen	0	Dokumen	0%
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		1	Dokumen	0	Dokumen	0%
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		8	Laporan	0	Laporan	0%
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		5	Laporan	0	Laporan	0%
1.6.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen	0	Persen	0%

1.6.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27	Orang		Bulan		bulan		bulan		27	Orang	0	Orang	0%
1.6.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		12	Dokumen	0	Dokumen	0%
1.6.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		18	Laporan		Laporan	0%
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen		Persen	0%
1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		1	Dokumen		Dokumen	0%
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen		Persen	0%

1.06.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	70	Paket		Paket		Paket		Paket		70	Paket		Paket	0%
1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Perundangan	5	Orang		Orang		Orang		Orang		5	Orang		Orang	0%
1.06.01.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen		Persen	0%
1.06.01.2.6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket		Paket		Paket		Paket		12	Paket		Paket	0%
1.06.01.2.6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	Paket		Paket		Paket		Paket		12	Paket		Paket	0%
1.06.01.2.6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	Paket		Paket		Paket		Paket		12	Paket		Paket	0%
1.06.01.2.6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		12	Dokumen		Dokumen	0%
1.06.01.2.6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		12	Laporan		Laporan	0,00%

1.06.01.2.6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	22	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		22	Laporan		Laporan	0%
1.06.01.2.6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		12	Dokumen		Dokumen	0%
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen		Persen	0%
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	13	Unit		Unit		Unit		Unit		13	Unit		Unit	0%
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Lainnya	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen		Persen	0%
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		12	Laporan		Laporan	0%
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		12	Laporan		Laporan	0%

1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		2	Laporan		Laporan	0%
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		12	Laporan		Laporan	0%
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen		Persen	0%
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9	Unit		Unit		Unit		Unit		9	Unit		Unit	0%
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100	Unit		Unit		Unit		Unit		100	Unit		Unit	0%
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Rehabilitasi	1	Unit		Unit		Unit		Unit		1	Unit		Unit	0%
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen		Persen	0%

1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi kegiatan pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen		Persen	0%
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	20	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		20	Dokumen		Dokumen	0%
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan pengembangan PSKS	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen		Persen	0%
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekersja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	20	Orang		Orang		Orang		Orang		20	Orang		Orang	0%
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten/ Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	42	Orang		Orang		Orang		Orang		42	Orang		Orang	0%

1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	27	Keluarga		Keluarga		Keluarga		Keluarga		27	Keluarga		Keluarga	0%
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	7	Lembaga		Lembaga		Lembaga		Lembaga		7	Lembaga		Lembaga	0%
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat dari hasil peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	20	Sertifikat		Sertifikat		Sertifikat		Sertifikat		20	Sertifikat		Sertifikat	0%
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase tingkat penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen		Persen	0,00%
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota ke Desa/ Kelurahan asal	100	Persen		Persen	100	Persen		Persen		100	Persen		Persentase	0,00%

1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan asal kewenangan Kabupaten/ Kota	5	Orang		Orang		Orang		Orang		5	Orang		Orang	0,00%
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen		Persen	0%
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen		Persen	0%
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan	7795	Orang		Orang		Orang		Orang		7795	Orang		Orang	0%

		standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/ Kota														
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/ Kota	300	Orang		Orang		Orang		Orang		300	Orang		Orang	0%
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/ Kota	5	Orang		Orang		Orang		Orang		5	Orang		Orang	0%
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	40	Orang		Orang		Orang		Orang		40	Orang		Orang	0%
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kewenangan Kabupaten/ Kota	50	Orang		Orang		Orang		Orang		50	Orang	50	Orang	0%

1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	100	Orang		Orang		Orang		Orang		100	Orang	100	Orang	0%
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,Akta Kelahiran,Surat Nikah dan Kartu Identitas	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	40	Orang		Orang		Orang		Orang		40	Orang		Orang	0%
1.06.04.2.01.0008	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/ Kota	60	Orang		Orang		Orang		Orang		60	Orang		Orang	0%
1.06.04.2.01.0009	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/ Kota	200	Orang		Orang		Orang		Orang		200	Orang		Orang	0%
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan	10	Orang		Orang		Orang		Orang		10	Orang		Orang	0%

		pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/ Kota														
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	40	Orang		Orang		Orang		Orang		40	Orang		Orang	0%
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Pelayanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/ Kota	80	Orang		Orang		Orang		Orang		80	Orang		Orang	0%
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA di luar panti	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen		Persen	0%
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/ Kota	300	Orang		Orang		Orang		Orang		300	Orang		Orang	0%
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV.AIDS dan NAPZA	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah	50	Orang		Orang		Orang		Orang		50	Orang		Orang	0%

		Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/ Kota														
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima bantuan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen		Persen	0%
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin warga Kota Pontianak yang diperbaharui	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen		Persen	0%
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/ Kota yang didata	40000	Orang		Orang		Orang		Orang		40000	Orang		Orang	0%
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/ Kota	20.000	Keluarga		Keluarga		Keluarga		Keluarga		20.000	Keluarga		Keluarga	0%
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	10.000	Keluarga		Keluarga		Keluarga		Keluarga		10000	Keluarga		Keluarga	0%

		Kabupaten/ Kota														
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	100	Orang		Orang		Orang		Orang			Orang		Orang	0,00%
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen		Persen	0%
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten/ Kota	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Pesen		Persen	0,00%
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/ Kota	350	Orang		Orang		Orang		Orang		350	Orang		Orang	0%
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap	200	Orang		Orang		Orang		Orang		200	Orang		Orang	0%

		darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan Kabupaten/ Kota														
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan Kabupaten/ Kota	100	Unit		Unit		Unit		Unit		100	Unit		Unit	0%
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/ Kota	4	Kelompok		Kelompok		Kelompok		Kelompok		4	Kelompok		Kelompok	0%
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/ Kota	12	Orang		Orang		Orang		Orang		12	Orang		Orang	0%
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase penyelenggara an pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/ Kota	100	Persen		Persen		Persen		Persen		100	Persen		Persen	0%

1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/ Kota	50	Orang		Orang		Orang		Orang		50	Orang		Orang	0%
-------------------	--	--	----	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	----	-------	--	-------	----

Pontianak, Agustus 2023
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK,

drg. TRISNAWATI, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19730610 200012 2 004

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2021 bahwa sejalan dengan visi, misi dan arah kebijakan umum APBD tahun 2021, alokasi anggaran keseluruhan Dinas Sosial Kota Pontianak mencapai Rp. 11.363.257.638,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.855.044.856,00 atau 95,53%. Pada tahun 2022 alokasi anggaran keseluruhan sebesar Rp. 10.551.430.535,00 telah terealisasi sebesar Rp.9.788.380,00 atau 92,77%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/ Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/ indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu baik dalam perencanaan maupun penanggaran wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Pontianak dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak telah dilaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Renstra 2020-2024.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK

NO	INDIKATOR	SPM /STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	Persentase (%) penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM)	27,8%	Persentase (%) penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		100%	100%	100%	97,92%	100%	100%	100%	
			Jumlah Layanan dan Pengaduan yang dimiliki		6500	6500	200	7662	254	200	200	

NO	INDIKATOR	SPM /STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
			Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepang yang untuk masuk dalam data terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu		1161 Jiwa	1161 Jiwa	1000 Jiwa	1161 Jiwa	616 Jiwa	1000 Jiwa	1000 Jiwa	Data yang masuk ke Dinas Sosial Kota Pontianak hanya berbentuk usulan yang harus dilakukan verifikasi dan validasi Kembali. Finalisasi dilakukan oleh Kementerian.
			Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		154 Orang	3 Tim	3 Tim	154 Orang	3 Tim	3 Tim	3 Tim	
			Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang dijangkau		250 Orang	250 Orang	250 Orang	288 Orang	254 Orang	250 Orang	250 Orang	
			Jumlah Kendaraan Roda 4 yang diakses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	
			Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		7065 orang/hari	7065 orang/hari	6570 orang/hari		7065 orang/hari	6570 orang/hari	7795 orang/hari	

			Jumlah rumah singgah/Shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	PLAT dan UPRS
			Jumlah penyandang Disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang menerima Paket Sandang		300 orang	300 orang	200 orang	58 orang	300 orang	200 orang	300 orang	
			Jumlah penyandang Disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang memanfaatkan alat bantu		100 orang	22 orang	5 orang	108 orang	57 orang	22 orang	5 orang	
			Jumlah Alat Bantu yang tersedia di rumah singgah/Shelter		3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	
			Jumlah Paket Perbekalan Kesehatan yang tersedia		-	-	-	-	-	-	-	Paket perbekalan Kesehatan sudah tidak tersedia pada SIPD
			Jumlah penyandang Disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang menerima Paket Perbekalan Kesehatan		-	-	-	39	-	-	-	Paket perbekalan Kesehatan sudah tidak tersedia pada SIPD
			Jumlah Tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah		2 Orang	2 Orang	2 Orang	4 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	
			Jumlah Pekerja Sosial Profesional dan/atau TKS /atau Relawan sosial yang disediakan		4 Orang	4 Orang	4 Orang	254 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	Jumlah Tenaga professional saja

			Jumlah penyandang Disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik,mental dan sosial sesuai standar di keluarga,masyarakat,dinas sosial,rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		104 orang	104 orang	104 orang	104 orang	104 orang	104 orang		
			Jumlah Bimbingan Sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
			Jumlah penyandang Disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang mendapatkan dokumen kependudukan		47 Orang	20 Orang	40 Orang	47 Orang	47 Orang	20 Orang	40 Orang	
			Jumlah penyandang Disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang mendapatkan akses layanan Pendidikan dan kesehatan	55 Orang	75 Orang	60 Orang	60 Orang	56 Orang	75 Orang	60 Orang	60 Orang	
			Jumlah penyandang Disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang mendapatkan akses layanan penelusuran keluarga	34 Orang	60 Orang	80 Orang	40 Orang	46 Orang	72 Orang	80 Orang	40 Orang	

			Jumlah penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang di Reunifikasi dengan keluarga		25 Orang	80 Orang	40 Orang	47 Orang	72 Orang	80 Orang	40 Orang	
			Jumlah penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Gepeng yang rujuk	3 Orang	60 Orang	80 Orang	80 Orang	12 Orang	93 Orang	80 Orang	80 Orang	
2.	Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100%	Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Jumlah Korban Bencana Yang mendapatkan makanan	144 Jiwa	420 Orang/hari	1250 Orang/hari	350 orang/hari	144 Jiwa	420 Orang/hari	1250 Orang/hari	350 Orang/hari	
			Jumlah Korban Bencana Yang mendapatkan paket sandang	131 Jiwa	79 Jiwa	500 Jiwa	200 Jiwa	131 Jiwa	79 Jiwa	500 Jiwa	200 Jiwa	
			Jumlah Penampungan Pengungsi yang di miliki	36 unit	101 unit	650 unit	100 unit	36 unit	101 unit	650 unit	100 unit	
			Jumlah Paket Permakanan khusu bagi kelompok Rentan	-	-	4 kelompok	4 kelompok	-	-	4 kelompok	4 kelompok	
			Jumlah Korban Bencana yang menerima pelayanan dikungan psikososial	-	111 Orang	100 Orang	12 Orang	-	111 Orang	100 Orang	12 Orang	

			Jumlah Pekerja Sosial dan /atau TKS dan atau/relawan sosial yang tersedia		75 Orang	75 Orang	75 Orang	254 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	
--	--	--	---	--	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	--

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dan masyarakat dimasa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai kondisi/ kejadian penting/ keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; dan
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

- A. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak dan Hal Kritis yang terkait dengan Pelayanan.

Dinas Sosial Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Wali kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Sosial. Setelah dilakukan evaluasi terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis Dinas Sosial Kota Pontianak dalam hal pelayanan adalah :

1. Kemiskinan

- a. Kurangnya lapangan pekerjaan.
- b. Tingkat pendidikan (SDM) rendah.
- c. Lapangan pekerjaan yang tersedia lebih banyak membutuhkan tenaga fisik atau masih kurangnya lapangan pekerjaan.
- d. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial.
- e. Penerima bantuan sosial masih belum tepat sasaran.

Pengaruh dari isu tersebut dapat berpotensi meningkatnya angka kriminalitas dan angka putus sekolah.

2. Anak Terlantar

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga tidak dapat terpenuhi sehingga menjadi gelandangan dan pengemis menjadi pilihan pemenuhan biaya untuk kebutuhan dasar.
- b. Masih memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam penanganan anak terlantar.
- c. Perlu penanganan secara intensif dari Perangkat Daerah terkait termasuk daerah Provinsi.
- d. Penanganan orang terlantar belum maksimal.

Pengaruh dari isu tersebut adalah citra Kota Pontianak menjadi buruk karena penanganan gelandangan dan anak terlantar tidak pernah selesai.

3. Penyandang Disabilitas

- a. Perlu adanya peningkatan cakupan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.
- b. Perlu adanya peningkatan penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas sehingga masih memerlukan bantuan sosial dari Kementerian Sosial.
- c. Memfasilitasi akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

Pengaruh dari isu tersebut adalah masih banyaknya penyandang disabilitas yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya.

4. Lanjut Usia Terlantar

- a. Perlu adanya rencana aksi atau *roadmap* dalam memberikan pelayanan kepada penduduk lanjut usia.

- b. Keterbatasan informasi bagi lanjut usia terlanter.
- c. Perlu kerjasama dengan Kelurahan dan Kecamatan terkait kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlanter.

Pengaruh dari isu tersebut adalah kebutuhan pokok hidup untuk memenuhi pelayanan sosial lanjut usia belum terjamin.

B. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak

Berdasarkan Perda tersebut, maka keluarlah peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun peraturan dimaksud dapat digambarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Sosial.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial Kota Pontianak mempunyai fungsi yang meliputi :

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Sosial
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial
- d. Pelaksanaan Adminstrasi Dinas Sosial
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial

Secara umum isu-isu penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah yang berdasarkan kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 yaitu dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.
 2. Komitmen yang tinggi dari Dinas Sosial Kota Pontianak untuk mengurangi angka kemiskinan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Pontianak.
 3. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
 4. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.
- C. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/ internasional.

Bank Dunia dalam laporannya berjudul *Indonesia Poverty Assessment : Pathways Towards Economic Security* yang dirilis pada awal bulan Mei 2023 menyebutkan bahwa Indonesia dinilai berhasil dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem, dimana kemiskinan ekstrem di Indonesia per Maret 2022 sebanyak 1,5% dari jumlah penduduk. Meskipun angka ini sedikit berbeda dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022 yakni 2,04% tetapi hal tersebut tetap menunjukkan bahwa upaya penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia mengalami kemajuan dari angka 2,14% di tahun 2021.

Untuk mencapai target angka kemiskinan 0% pada 2024, Presiden Republik Indonesia meminta seluruh pihak terkait agar terus melakukan konvergensi, integrasi, dan peningkatan kualitas pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan memanfaatkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Adapun gambaran pencapaian visi dan misi Daerah terhadap capaian program nasional adalah sebagai berikut :

TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA		TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN SKPD	TARGET CAPAIAN				SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD	TARGET CAPAIAN			
		URAIAN IKU	SATUAN			SATUAN	2024	2025	2026			SATUAN	2024	2025	2026
Terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan	Menurunnya Kemiskinan	-Tingkat Kemiskinan -Rasio Gini -Tingkat Kemiskinan Ekstrem	% Ratio %	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	4,20 - 4,25	4,20 - 4,25	4,10 - 4,20	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kemampuan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	100	100	100
										Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				
										Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu				

D. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak

Untuk menunjang kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Hasil identifikasi permasalahan tugas pokok dan fungsi dilakukan melalui Analisis SWOT, analisa strategi yang diuraikan adalah sebagai berikut :

<u>Strengths (S)</u> • Kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang sosial. • Peningkatan komitmen pelayanan. • Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penataan manajemen pelayanan. • Kerjasama dengan Pekerja Sosial yang ada di Kelurahan dan Kecamatan. • Adanya regulasi yang mengatur pembagian kewenangan masing-masing perangkat daerah dalam hal penanganan PMKS. • Telah terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di Kelurahan. • Komitmen dan motivasi kerja yang tinggi.	<u>Weakness (W)</u> • Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk pelayanan pengaduan serta penanganan permasalahan sosial. • Jangkauan mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). • Daftar DTKS belum valid dan update. • Keterbatasan anggaran. • Tidak mendapatkan akses DTKS dari Kementerian Sosial.
<u>Opportunities (O)</u> • Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja. • Produk hukum yang memadai. • Dukungan kerjasama para pemangku kepentingan. • Dukungan dari pekerja sosial. • Dukungan instansi vertikal.	<u>Threads (T)</u> • Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum lengkap. • Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah sosial. • Sikap apatis individu terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). • PMKS yang sulit diatur. • Pembagian kewenangan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota belum dijalankan dengan maksimal

E. Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Angka Kemiskinan	Kemiskinan	a. Kurangnya lapangan pekerjaan b. Tingkat pendidikan (SDM) rendah c. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan Bantuan Sosial d. Kementerian Sosial tidak menyampaikan DTKS yang update secara lengkap
		Anak Terlantar	a. Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga tidak terpenuhi sehingga menjadi gelandangan dan pengemis b. Keterbatasan wewenang Dinas Sosial Kota Pontianak dalam penanganan Anak Terlantar
		Penyandang Disabilitas	a. Minim akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas
		Lanjut Usia Terlantar	a. Keterbatasan informasi bagi lanjut usia terlantar

Dalam hal penyelesaian isu-isu penting diatas perlu untuk dilakukan evaluasi pencapaian tahun sebelumnya dan verifikasi serta validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara berkala sehingga program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dapat terlaksana dengan maksimal dan sesuai ketentuan.

2.4. REVIEW TERHADAPA RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Sosial telah disesuaikan dengan perencanaan Bappeda. Perencanaan kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Kota Pontianak, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan

dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Kota Pontianak.

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KOTA PONTIANAK

DINAS SOSIAL

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Pontianak	% Keaktifan tingkat Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	1.321.407.500,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Pontianak	% Keaktifan tingkat Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	1.321.407.500,00	
	Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase fasilitasi kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/ Kota	100%	20.000.000	Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase fasilitasi kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/ Kota	100%	20.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Kota Pontianak	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	20 dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Kota Pontianak	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	20 dokumen	20.000.000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan pengembangan PSKS	100%	1.301.407.500	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan pengembangan PSKS	100%	1.301.407.500	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	20 PSM	492.465.700	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	20 PSM	492.465.700	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	42 Orang	310.600.800	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	42 Orang	310.600.800	
	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah keluarga yang mengikuti kapasitas kewenangan Kabupaten/ Kota	27 Keluarga	331.037.000	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah keluarga yang mengikuti kapasitas kewenangan Kabupaten/ Kota	27 Keluarga	331.037.000	
	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah Lembaga Kesejahteraan yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	7 Lembaga	120.000.000	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah Lembaga Kesejahteraan yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	7 Lembaga	120.000.000	
	Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Pontianak	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) kewenangan Kabupaten/ Kota	20 Sertifikat	47.304.000	Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Pontianak	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) kewenangan Kabupaten/ Kota	20 Sertifikat	47.304.000	
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kota Pontianak	(%) Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	2.480.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kota Pontianak	(%) Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	2.480.000	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Pontianak	% pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dan titik debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota ke Des/ Kelurahan asal	100%	2.480.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Pontianak	% pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dan titik debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota ke Des/ Kelurahan asal	100%	2.480.000	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Pontianak	Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan asal kewenangan Kabupaten/ Kota	5 orang	2.480.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Pontianak	Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan asal kewenangan Kabupaten/ Kota	5 orang	2.480.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Pontianak	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	957.253.400	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Pontianak	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	957.253.400	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar Panti Sosial	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	799.098.200	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar Panti Sosial	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	799.098.200	
	Penyediaan Permakanan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minumal Kewenagan Kabupaten/Koita	7795 orang	422.980.000	Penyediaan Permakanan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minumal Kewenagan Kabupaten/Koita	7795 orang	422.980.000	
	Penyediaan Sandang	Kota Pontianak	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	120.960.200	Penyediaan Sandang	Kota Pontianak	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	120.960.200	
	Penyediaan Alat Bantu	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	58.710.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	58.710.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	4.980.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	4.980.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kota Pontianak	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	20.412.800	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kota Pontianak	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	20.412.800	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Pontianak	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	48.575.200	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Pontianak	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	48.575.200	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kota Pontianak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	40 orang	4.980.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kota Pontianak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	40 orang	4.980.000	
	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	60 orang	14.980.000	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	60 orang	14.980.000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/ Kota	200 orang	61.580.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/ Kota	200 orang	61.580.000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	10 orang	31.980.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	10 orang	31.980.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	40 orang	3.980.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	40 orang	3.980.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	80 orang	4.980.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	80 orang	4.980.000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA di luar panti	100%	158.155.200	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA di luar panti	100%	158.155.200	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Pontianak	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	37.175.200	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Pontianak	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	37.175.200	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Pontianak	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	120.980.000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Pontianak	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	120.980.000	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Pontianak	% Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	100%	3.437.961.400	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Pontianak	% Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	100%	3.437.961.400	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase Data fakir miskin warga Kota Pontianak yang diperbaharui	100%	3.437.961.400	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase Data fakir miskin warga Kota Pontianak yang diperbaharui	100%	3.437.961.400	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	40.000 orang	677.255.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	40.000 orang	677.255.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	20.000 keluarga	34.980.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	20.000 keluarga	34.980.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	10.000 keluarga	2.700.000.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	10.000 keluarga	2.700.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Pontianak	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kKabupaten/Kota	100 orang	25.726.400	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Pontianak	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kKabupaten/Kota	100 orang	25.726.400	
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Pontianak	% Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	100%	496.380.700	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Pontianak	% Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	100%	496.380.700	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial Kabupaten/ kota	100%	468.150.100	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial Kabupaten/ kota	100%	468.150.100	
	Penyediaan Makanan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	350 orang	142.090.000	Penyediaan Makanan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	350 orang	142.090.000	
	Penyediaan Sandang	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pasca masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	159.225.000	Penyediaan Sandang	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pasca masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	159.225.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Pontianak	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	100 unit	60.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Pontianak	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	100 unit	60.000.000	
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok Rentan kewenangan Kabupaten/ Kota	4 kelompok	31.835.100	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok Rentan kewenangan Kabupaten/ Kota	4 kelompok	31.835.100	
	Pelayanan Dukungan Psikosisial	Kota Pontianak	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	75.000.000	Pelayanan Dukungan Psikosisial	Kota Pontianak	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	75.000.000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Kota Pontianak	Persentase korban bencana yang dievaluasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat	100%	28.230.600	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Kota Pontianak	Persentase korban bencana yang dievaluasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat	100%	28.230.600	
	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Pontianak	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	28.230.600	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Pontianak	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	28.230.600	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kota Pontianak	% Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesektariatan	95%	7.449.274.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kota Pontianak	% Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesektariatan	95%	7.449.274.000	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	54.019.400	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	54.019.400	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	14.645.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	14.645.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	7.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 laporan	12.480.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 laporan	12.480.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	5 Laporan	13.394.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	5 Laporan	13.394.400	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	4.684.027.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	4.684.027.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 orang/bulan	4.393.707.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 orang/bulan	4.393.707.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	275.400.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	275.400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	18 Laporan	14.920.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	18 Laporan	14.920.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.145.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.145.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	1.145.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	1.145.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	62.620.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	62.620.000	
	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya	Kota Pontianak	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta atribut Perlengkapannya	70 paket	42.620.000	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya	Kota Pontianak	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta atribut Perlengkapannya	70 paket	42.620.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	20.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	419.825.550	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	419.825.550	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	29.839.950	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	29.839.950	
	Penyediaan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	90.011.500	Penyediaan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	90.011.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket	80.886.100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket	80.886.100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	2.500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pontianak	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pontianak	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	22 laporan	159.578.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	22 laporan	159.578.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	52.010.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	52.010.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	468.812.532	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	468.812.532	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	468.812.532	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	468.812.532	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Pontianak	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	1.298.144.278	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Pontianak	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	1.298.144.278	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	245.045.078	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	245.045.078	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.021.099.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.021.099.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	460.680.240	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	460.680.240	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dians Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	159.120.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dians Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	159.120.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	111.010.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	111.010.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	190.550.240	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	190.550.240	Peruntukan anggaran untuk rehabilitasi Gedung kanor Dinas Sosial dan Rehabilitasi Gedung UPRS karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan
JUMLAH					13.664.757.000	JUMLAH				13.664.757.000	

2.5 PENELAAHAAN USULAN PROGRAM & KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan sampai Musrenbang tingkat Kota. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Pontianak untuk usulan program dan kegiatan yang bersumber dari masyarakat.

TABEL 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pemberdayaan Sosial		% Tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		% Pelaksanaan pengembangan PSKS		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota		
		Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	27 Orang setiap RW	
		RW 024 dan RW 025 Kelurahan Sungai Beliang	Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	27 Orang	
		RW 17 Kelurahan Sungai Jawi Luar	Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	15 Orang	
		Gg. Amal RT 002/RW 001 dan RT 003/RW 008 Kelurahan Mariana	Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	14 Orang	
		Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Kodrat RT 004 RW 015 Kelurahan Sungai Jawi Dalam	Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	20 Orang	
		Jl. Kemakmuran Gg. Keluarga RT 004/RW 021 Kelurahan Sungai Jawi Dalam	Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	3 Orang	
		Kelurahan Saigon	Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota		

		RT 002/ RW 002 dan RW 012 Kelurahan Tanjung Hulu	Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	11 Orang	
		Kelurahan Sungai Jawi Luar RW 025, RW 028, RW 013, RW 004, RW 010	Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	30 Orang	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		% Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		% data fakir miskin warga Kota Pontianak yang diperbaharui		
		Kelurahan Bangka Belitung Laut	Jumlah fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang didata	16 Orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2024-2026, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kementerian Sosial. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan penugasan RPJMN 2020-2024, dan kedua adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial. Dalam rangka mempertajam arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial memerlukan regulasi yang efektif dan aplikatif untuk mencapai sasaran strategis tersebut, yang pada akhirnya mencapai sasaran nasional. Arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi berupa Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri Sosial dituangkan dalam kerangka regulasi Kementerian Sosial 2020- 2024. Selanjutnya, untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial, sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, perlu disusun kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan ASN. Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi periode 2020-2024 disajikan dalam penjelasan sebagai berikut. Arah Kebijakan Nasional. Uraian mengenai arah kebijakan dan strategi nasional dalam Renstra ini merupakan penugasan kepada Kementerian Sosial sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kementerian Sosial bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian prioritas Presiden, selain bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sosial. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita

Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas SDM, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 Tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun Tujuan Renstra 2024-2026 Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut yaitu Menurunnya Kemiskinan.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik,terinci dapat terukur dan dapat dicapai. Adapun yang menjadi sasaran dalam Renstra 2024 - 2026 Dinas Sosial Kota Pontianak sebanyak 3 (tiga) sasaran yaitu :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%
2	Meningkatnya Penanganan Rehabilitas Sosial.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100%
3	Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu.	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan korban bencana alam dan sosial sesuai standar waktu	100%

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengklasifikasi sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yaitu keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kota Pontianak dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Pontianak adalah:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Kemiskinan	1. Meningkatnya Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial	1.1. Meningkatkan dan mendayagunakan segenap potensi dan sumber – sumber kesejahteraan sosial untuk peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	1.1. Optimalisasi dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Pontianak.
	2. Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	2.1. Meningkatkan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pendukung lainnya. 2.2. Melaksanakan rehabilitasi sosial dasar.	1.1. Peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

	3. Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan korban bencana sesuai standar waktu	3.1 Meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan korban bencana.	3.1. Peningkatan identifikasi pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan korban bencana.
--	---	---	---

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini dengan mengoptimalkan kewenangan untuk menggalang dukungan stakeholder, pekerja sosial dan instansi vertikal dalam penanganan PMKS; Menggalang lembaga sosial dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat miskin. Pemberdayaan ekonomi PMKS melalui bimbingan usaha dan bantuan modal, melaksanakan pelatihan bagi PMKS , percepatan pelayanan dan pengaduan masalah data kemiskinan melalui sistem layanan rujukan terpadu.

3.3 Program dan Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Rumusan Program, Kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak sangat dipengaruhi perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu isu strategis yang berkembang.

Dinas Sosial memiliki tugas untuk memberikan pelayanan berupa Pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan urusan wajibnya yang merupakan SPM bidang Sosial yaitu Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti, Anak Terlantar diluar panti, lanjut usia terlantar diluar panti serta gelandang dan pengemis diluar panti, Pemberian Bantuan dan Jaminan Sosial, dengan urusan wajibnya yang merupakan SPM bidang sosial yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota dan pemberdayaan Sosial bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan harkat dan martabat bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib, serta merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial tingkat Kota yang meliputi jenis pelayanan dasar terdiri atas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas

Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dengan adanya penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Daerah sebagai akibat terbitnya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemukhtahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan maka pada dokumen Recana Kerja (Renja) Tahun 2024 akan kami tuangkan dalam tabel rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Sosial Kota Pontianak. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah operasionalnya harus dituang kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun Program ,Kegiatan dan Sub kegiatan yang tertuang dalam Renja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 yang terdiri **dari 6 (tujuh) Program 16 Kegiatan dan 57 Sub kegiatan**. Alokasi Program, kegiatan dan sub kegiatan guna mendukung sasaran pada RPD yang juga merupakan Tujuan Dinas Sosial Kota Pontianak yaitu Menurunnya Kemiskinan. Adapun Pagu Indikatif Dinas Sosial Tahun 2024 sebesar Rp. 13.664.757,00 dengan sumber pendanaan untuk belanja Pegawai bersumber dari DAU dan PAD, untuk Belanja Barang bersumber dari DAU dan Dana Bagi Hasil, dan untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial bersumber dari DAU-dana bagi hasil. Adapun Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 terdiri dari 6 (tujuh) Program 16 Kegiatan dan 57 Sub kegiatan, dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR	SUMBER DANA
1. 1.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE KEAKTIFAN TINGKAT POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	DAU- Dana Bagi Hasil DAU- Dana Bagi Hasil

	Pengumpulan undangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan Barang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	DAU- Dana Bagi Hasil
1.2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengembangan PPKS	DAU- Dana Bagi Hasil
1.2.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
1.2.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
1.2.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
1.2.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabipaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
1.2.5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN	(%) Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	DAU- Dana Bagi Hasil

	KORBAN TINDAK KEKERASAN		
2.1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	% Tingkat Penanganan Bagi Warga Negara Imigran Tindak Kekerasan	DAU- Dana Bagi Hasil
2.1.1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Psykotik Terlantar yang ditangani dan dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	DAU- Dana Bagi Hasil
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.1	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Standar Gizi Minumal Kewenangan Kabupaten/Koita	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.2	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil

3.1.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.5	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik,mental spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.6	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,Akta Kelahiran,Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk kependudukan,Akta Kelahiran,Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.8	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.1.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya	DAU- Dana Bagi Hasil

	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA diluar panti	
3.2.1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,Mental spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
3.2.2	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV.AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV.AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima	DAU- Dana Bagi Hasil
4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data fakir miskin warga kota Pontianak yang diperbaharui	DAU- Dana Bagi Hasil
4.1.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakiri Miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	DAU- Dana Bagi Hasil
4.1.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
4.1.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
4.1.4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kKabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	% Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	DAU- Dana Bagi Hasil
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana sosial Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil

5.1.1	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
5.1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pasca masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
5.1.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	DAU- Dana Bagi Hasil
5.1.4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
5.1.4	Pelayanan Dukungan Psikosisial	Jumlah korban banecana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
5.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
5.2.1	Koordinasi ,sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Bagi Hasil
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	% Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesektariatan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.1	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

6.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumn RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumn RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	DAU, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, PAD
6.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

6.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.4.1	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan tehnis implementasi peraturan perundang-undangan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.5.2	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

6.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dians Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.8.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Pontianak

Dengan diterbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan disusun pada Renja Tahun 2024 Renja Dinas Sosial Kota Pontianak yang terdiri dari 6 (enam) Program 16 Kegiatan dan 57 Sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

TABEL 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL														
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.664.757.000,00							13.713.557.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						13.664.757.000,00							13.713.957.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	100%	100%	95 %	7.449.274.000,00						95 %	7.774.521.400,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100 %	54.019.400,00						100%	60.394.400,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	14.645.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	8 Dokumen	18.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	1 Dokumen	6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	2 Dokumen	7.500.000,00	DINAS SOSIAL

[illegible]

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	14.920.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	18 Laporan	14.920.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	100%	100%	100 %	1.145.000,00						100%	1.145.000,00	
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.145.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	1 Dokumen	1.145.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100 %	62.620.000,00						100%	62.620.000,00	
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	110 Paket	66 Paket	70 Paket	42.620.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	70 Paket	42.620.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	5 Orang	20.000.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	5 Orang	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100 %	419.825.550,00						100%	510.247.550,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor														

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	29.839.950,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	12 Paket	29.839.950,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	90.011.500,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	12 Paket	90.011.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	80.886.100,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	12 Paket	80.886.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			12 Dokumen	2.500.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	12 Dokumen	2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	5.000.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	12 Laporan	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	159.578.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	34 Laporan	250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	52.010.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	12 Dokumen	52.010.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100 %	468.812.532,00						100%	338.613.172,00	
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	13 Unit	13 Unit	468.812.532,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	13 Unit	338.613.172,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Lainnya	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100 %	1.298.144.278,00						100%	1.298.144.278,00	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	12 Laporan	12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	245.045.078,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	12 Laporan	245.045.078,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	12 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	2 Laporan	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.021.099.200,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	12 Laporan	1.021.099.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100 %	460.680.240,00						100%	770.130.000,00	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	4 Unit	9 Unit	159.120.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	9 Unit	159.120.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	100 Unit	100 Unit	111.010.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	100 Unit	111.010.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 Unit	1 Unit	190.550.240,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak	1 Unit	500.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	98%	100%	100 %	1.321.407.500,00						100 %	1.493.066.500,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	100 %	20.000.000,00						100%	20.000.000,00	
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	-	-	20 Dokumen	20.000.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Masyarakat	20 Dokumen	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengembangan PSKS	100%	98%	100%	100 %	1.301.407.500,00						100%	1.473.066.500,00	

	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6500 Orang	8383 Orang	6500 Orang	20 (PSM) Orang	492.465.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	20 (PSM) Orang	492.465.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	59 Orang	59 Orang	70 Orang	42 Orang	310.600.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	42 Orang	410.600.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Keluarga	37 Keluarga	27 Keluarga	27 Keluarga	331.037.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	27 Keluarga	400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	2 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	120.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	7 Lembaga	120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														

[illegible]

	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	120.960.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	300 Orang	120.960.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	57 Orang	22 Orang	5 Orang	58.710.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	5 Orang	58.710.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	72 Orang	80 Orang	40 Orang	4.980.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	40 Orang	4.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	104 Orang	50 Orang	50 Orang	20.412.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	50 Orang	20.412.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														

			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	72 Orang	100 Orang	100 Orang	48.575.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100 Orang	48.575.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	47 Orang	20 Orang	40 Orang	4.980.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	40 Orang	4.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	75 Orang	75 Orang	60 Orang	14.980.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	60 Orang	14.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	254 Orang	200 Orang	200 Orang	61.580.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	200 Orang	61.580.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														

	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	11 Orang	10 Orang	10 Orang	31.980.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Periyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	10 Orang	31.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	240 Orang	93 Orang	80 Orang	80 Orang	4.980.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Periyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	80 Orang	4.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	100%	100%	100%	100 %	158.155.200,00						100%	158.155.200,00	
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	133 Orang	50 Orang	300 Orang	37.175.200,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Periyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	300 Orang	37.175.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA														

			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	73 Orang	10 Orang	50 Orang	120.980.000,00		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	50 Orang	120.980.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	100%	100%	100%	100 %	3.437.961.400,00							100 %	3.023.935.100,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin warga kota Pontianak yang diperbaharui	100%	100%	100%	100 %	3.437.961.400,00							100%	3.023.935.100,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	120.000 Orang	29 Berita Acara	1500 Orang	40000 Orang	677.255.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Masyarakat	40000 Orang	450.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	60.000 Keluarga	1.500 Kartu	10.000 Keluarga	20000 Keluarga	34.980.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Masyarakat	20000 Keluarga	34.980.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga															
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000 Keluarga	53 Pendamping	89 Keluarga	10000 Keluarga	2.700.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan an Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Masyarakat	10000 Keluarga	2.512.955.100,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat															

			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	-	-	100 Orang	25.726.400,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Masyarakat	100 Orang	26.000.000,00	DINAS SOSIAL
6,	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial	100%	100%	100%	100 %	496.380.700,00						100 %	410.680.600,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100 %	468.150.100,00						100%	382.450.000,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1050 Orang	420 Orang	1250 Orang	350 Orang	142.090.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Korban bencana alam dan bencana sosial	350 Orang	142.090.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	79 Orang	500 Orang	200 Orang	159.225.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Korban bencana alam dan bencana sosial	200 Orang	159.225.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Unit	101 Unit	650 Unit	100 Unit	60.000.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Korban bencana alam dan bencana sosial	100 Unit	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 (Kelompok) Orang	-	4 (Kelompok) Orang	4 (Kelompok) Orang	31.835.100,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Korban bencana alam dan bencana sosial	4 (Kelompok) Orang	31.135.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	111 Orang	110 Orang	12 Orang	75.000.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Korban bencana alam dan bencana sosial	12 Orang	30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	100%	-	100 %	100%	28.230.600,00						100%	28.230.600,00	
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	-	-	50 Orang	28.230.600,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Taruna Siaga Bencana dan Masyarakat	50 Orang	28.230.600,00	DINAS SOSIAL
J U M L A H								13.664.757.000							13.713.957.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan persoalan masyarakat khususnya dalam bidang sosial sebagai wujud nyata dari tanggungjawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan kehidupan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan kehidupan masyarakat Kota Pontianak yang berharkat dan bermartabat sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak adalah Program Tahunan Dinas Sosial Kota Pontianak yang sesuai Tupoksi dan sasaran Program Dinas Sosial Kota Pontianak. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Pontianak ini disusun sebagai bahan acuan serta evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun anggaran sebelumnya, dengan adanya dokumen Renja diharapkan pelaksanaan anggaran dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kota Pontianak yang efisien serta tepat sasaran, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan masyarakat Kota Pontianak.

Pontianak, Agustus 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK**



drg. TRISNAWATI, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19730610 200012 2 004